

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan investigasi kecurangan terhadap proses pengadaan perangkat IT penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) jarak jauh di tingkat SMP di Kabupaten Bandung Barat, ditemukan sejumlah indikasi penyimpangan yang mencakup aspek kepatuhan, hasil pekerjaan, dan hukum.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 tidak menyebutkan temuan spesifik terkait pengadaan perangkat IT untuk KBM jarak jauh di SMP. Namun, terdapat temuan ketidakpatuhan umum pada proyek lain yang menunjukkan masalah pengelolaan dan penggunaan anggaran yang tidak efisien. Temuan terkait ketidaksesuaian regulasi dan potensi pemborosan anggaran menunjukkan bahwa pengawasan dan akuntabilitas dalam pengadaan perlu ditingkatkan. Proses pengadaan yang cepat dan terkesan terburu-buru menimbulkan kecurigaan terhadap transparansi dan keadilan dalam proses tender. Spesifikasi perangkat IT yang diadakan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk KBM jarak jauh, dan beberapa perangkat dinilai memiliki spesifikasi yang terlalu tinggi dan tidak relevan. Beberapa perangkat tidak digunakan secara optimal dan masih tersimpan dalam kemasan, menunjukkan bahwa pengadaan tidak didasarkan pada analisis kebutuhan yang sebenarnya. Harga perangkat IT yang tidak wajar dan spesifikasi yang tidak relevan menunjukkan adanya inefisiensi dan pemborosan anggaran, melanggar prinsip efisiensi dan efektivitas dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Temuan adanya praktik monopoli

dan kartel serta indikasi kerjasama antara penyedia dan instansi pemerintah melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan ketentuan dalam UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dari hasil investigasi ini, dapat disimpulkan bahwa potensi kecurangan dalam paket pengadaan barang/jasa publik dapat dibuktikan dengan Metode Investigasi Kecurangan. Skor PFA (Potential Fraud Analysis) dalam Opentender dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan investigasi kecurangan pada suatu paket pengadaan barang/jasa publik.

6.2. Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, metode investigasi kecurangan ICW sudah menjadi alat yang dapat mengeksplorasi potensi kecurangan. Kendati demikian masih terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dari metode ini. Salah satu keterbatasan utama dalam metode investigasi kecurangan ini adalah akses data. Masih banyak pengadaan publik tidak terbuka dan transparan, sebagaimana dalam penelitian ini. Selain itu proses yang cukup menguras waktu adalah untuk melakukan verifikasi informasi yang valid dan menghindari disinformasi. Maka dari itu ICW perlu meningkatkan dan memperkuat lagi kerjasamanya dengan lembaga-lembaga terkait seperti yang sudah dilakukan dengan LKPP. Hal ini akan sangat membantu para investigator dalam mengumpulkan informasi dan memastikan data yang didapat adalah data yang akurat.

Dengan penerapan saran-saran di atas, diharapkan proses investigasi menjadi lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak waktu. Peneliti juga memberikan rekomendasi untuk penelitian lanjutan yakni:

1. Menelusuri lebih lanjut dampak buruk apa saja yang mungkin terjadi di lapangan (sekolah) yang diakibatkan oleh kecurangan pengadaan barang/jasa publik di sektor pendidikan.
2. Mengeksplorasi lebih lanjut keandalan metode investigasi fraud pengadaan barang/jasa publik dari ICW.
3. Menyelidiki praktik monopoli dan kartel secara mendalam untuk mengetahui bentuk dan ciri-ciri praktik monopoli dan kartel yang mungkin terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Meneliti perkembangan teknologi untuk mendeteksi fraud dengan menilai efektivitas teknologi deteksi fraud yang sudah ada untuk mengetahui kelemahannya dan mengeksplorasi perkembangan teknologi yang dapat diadopsi dikembangkan di Indonesia untuk mendeteksi fraud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, A., Albrecht, C., Vance, A., & Hansen, J. (2012). Metafraud: A meta-learning framework for detecting financial fraud. *Mis Quarterly*, 1293-1327.
- Ariesta, F. A., & Safitri, Y. (2019). Fraud prevention: The use of data mining in the government's electronic procurement system. *Journal of Procurement, Supply Chain and Logistics*, 2(1), 53-64.
- Indrajit, R. E. (2020). *E-Government in Action: The Indonesian Experience*. Emerald Publishing Limited.
- Kristiansen, S., Dwiyanto, A., Pramusinto, A., & Putranto, E. A. (Eds.). (2008). *Public sector reform in Indonesia: The challenge of corruption*. NIAS Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik – Edisi Terbaru 2018*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming government*. Reading Mass. Adison Wesley Public Comp.
- Phua, C., Lee, V., Smith, K., & Gayler, R. (2010). A comprehensive survey of data mining-based fraud detection research. arXiv preprint arXiv:1009.6119.
- Sedarmayanti. (2011). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Edisi 2)*. Refika Aditama.
- Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2014). Political budget cycles in Indonesia at the district level. *Economics Letters*, 122(2), 342-345.
- Surianta, I. K., & Eryanto, H. (2020). Fraud prevention: data mining application in the government goods and services procurement. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(12), 481-492.
- Zainal, A., Irianto, G., & Juliandi, A. (2020). Prevention of fraud in the procurement of goods and services in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 23(3), 1-6.

- Smith, C.D. (2018). An examination of public procurement fraud. In *Combating Fraud and Corruption in Government* (pp. 27-44). Routledge.
- Rizal (2023). Analisis Kecurangan pengadaan barang/jasa Pendidikan di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 4 No.1 hlm 45-6.
- Diana (2022). Audit Investigatif Pengadaan Laptop SMP Kota Bogor. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol.8 No.2 hlm 70-90
- Junaedi (2023). Analisis Risiko Kecurangan Pengadaan Komputer SMA Kota Depok. *Jurnal Akuntansi Forensik*. Vol. 1 No. 1 hlm 25-45
- Kurniawan (2024). Deteksi Fraud Pengadaan Multimedia Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol 11 No. 1 hlm 55-71.
- Lukman, S. (2007). *Hukum pengadaan barang dan jasa di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Tawakal, I. (2021, Desember 13). Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Kota Bandung kedatangan seperangkat alat penunjang pembelajaran jarak jauh di penghujung tahun 2020. *BandungBergerak.id*.